

**Evaluasi Program Jatim Puspa (Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan)
Dalam Menciptakan Mata Pencaharian Berkelanjutan Bagi Keluarga Miskin
di Desa Karangharjo Kabupaten Jember**

Moh. Muqit¹, Faiqoh Nurul Hikmah²

*Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moch.Sroeji Jember
Email: 22140912115@umsj.ac.id
faiqoh@umsj.ac.id*

Abstrak

Dampak Covid-19 mempengaruhi sektor ekonomi di Indonesia, alhasil kondisi tersebut menimbulkan masalah yang saling terkait satu sama lain yaitu pembangunan dan masalah kemiskinan sehingga menjadi sorotan bagi masyarakat luas. Jatim Puspa ialah bentuk usaha pemerintah guna mengoptimalkan perolehan masyarakat terdampak untuk memulihkan dan meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi. Penelitian ini jenis/tipe penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di lapangan menunjukkan bahwa program Jatim Puspa di Desa Karangharjo sudah bisa meningkatkan ekonomi dan menciptakan mata pencaharian berkelanjutan. Program Jatim Puspa juga mengurangi beban Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terutama ibu rumah tangga. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu keluarga miskin agar mampu meningkatkan kualitas hidup serta mampu memutus rantai kemiskinan. Hasil evaluasi program Jatim Puspa (Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan) dalam menciptakan mata pencaharian berkelanjutan bagi keluarga miskin di Desa Karangharjo, Kabupaten Jember keseluruhan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan kembali. Pelaksanaan bantuan program Jatim Puspa dapat dilanjutkan dengan catatan guna untuk terpenuhinya kebutuhan usaha Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Kata Kunci: Pemberdayaan, Jatim Puspa, Mata Pencaharian Berkelanjutan

Abstract

The impact of Covid-19 has affected the economic sector in Indonesia, as a result, this condition has given rise to problems that are interrelated with each other, namely development and poverty, so that they have become a focus for the wider community. Jatim Puspa is a form of government effort to optimize the income of affected communities to restore and increase social and economic resilience. This research is a type of qualitative descriptive research. The results of research conducted by researchers in the field show that the Jatim Puspa program in Karangharjo Village has been able to improve the economy and create sustainable livelihoods. The Jatim Puspa program also reduces the burden on Beneficiary Families (KPM), especially housewives. It is hoped that this assistance can help poor families to improve their quality of life and break the chain of poverty. The evaluation results of the Jatim Puspa (East Java Women's Business Empowerment) program in creating sustainable livelihoods for poor families in Karangharjo Village, Jember Regency are overall quite good, although there are still several things that need to be improved. The implementation of the Jatim Puspa program assistance can be continued with the aim of meeting the business needs of Beneficiary Families (KPM).

Keywords: Empowerment, Jatim Puspa, Sustainable Livelihood

Pendahuluan

Dampak yang terlihat dari adanya Covid-19 tidak hanya mempengaruhi kesehatan masyarakat, tetapi mempengaruhi perekonomian di berbagai negara. Bahkan saat ini perekonomian dunia mengalami tekanan berat yang diakibatkan oleh virus tersebut. Pandemi Covid-19 menimbulkan efek negatif dari kesehatan ke masalah sosial dan berlanjut ke ekonomi negara. Indonesia merupakan sebuah negara yang mempunyai kekayaan terbanyak, namun memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran yang besar pula. Upaya menanggulangi kemiskinan dilakukan proses penguat penduduk miskin, yang mencakup lima aspek yaitu, pengembangan sumber daya manusia, penyediaan modal kerja, penciptaan peluang dan kesempatan berusaha, pengembangan kelembagaan penduduk miskin, serta penciptaan sistem pelayanan kepada penduduk miskin yang sederhana dan efisien.

Melalui jalur pendekatan tersebut, penduduk miskin diharapkan mampu, dengan kekuatan sendiri, menanggulangi kemiskinannya serta meningkatkan kesejahteraannya secara memadai dan berkelanjutan. Kebijakan maupun program dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia saat ini lebih berpihak kepada masyarakat miskin yang merupakan objek

dalam pembangunan (Ismawan, 2001).

Pembangunan di Indonesia saat ini menekankan pada pentingnya pemberdayaan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan, melalui program pemberdayaan upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya sebatas memberikan bantuan langsung kepada penduduk lain akan tetapi melibatkan masyarakat miskin untuk mengembangkan potensinya.

Kesenjangan ekonomi di Indonesia merupakan salah satu permasalahan yang belum teratasi secara tuntas. Kesenjangan ekonomi dapat menyebabkan berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas (Eka Sastra, 2017).

Menurut Ismawan (2001) menyatakan bahwa terdapat dua pendekatan dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan di Indonesia. Permasalahan kemiskinan juga dialami oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Data kemiskinan yang ada di Kabupaten Jember didapatkan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Badan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 20 Tahun

2022 Tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Jawa Timur yang menyatakan bahwa Program Jatim Puspa diadakan untuk meningkatkan mata pencaharian berkelanjutan bagi keluarga miskin guna memulihkan perekonomian. Hal tersebut relevan dengan teori implementasi kebijakan publik oleh Merilee S. Grindle dalam Anggara (2014) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan bergantung pada Isi Kebijakan dan Konteks Implementasi.

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang pertama berkaitan dengan implementasi kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan dari (Sasmito & Nawangsari, 2019) membahas tentang implementasi menciptakan mata pencaharian berkelanjutan bagi keluarga miskin dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Desa Karangharjo Kabupaten Jember. Serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Lalu terdapat penelitian terdahulu yang kedua dari (Chasanah et al., 2021) menganalisis pelaksanaan Program Keluarga Miskin di Desa Karangharjo Kecamatan Silo Kabupaten Jember di era adaptasi kebiasaan baru. Sementara itu penelitian terdahulu yang ketiga dari (Nuryana, 2022)

yang menganalisis tentang efektivitas dan kendala selama pemberian bantuan Program Jatim Puspa untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi di Desa Sawoo Kabupaten Ponorogo.

Menurut data Badan Pusat Statistik. (2023), Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang masih menjadi tantangan besar di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Jember. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan adalah dengan memberdayakan masyarakat, khususnya perempuan, Wardhani, R. A. (2019).

Jatim Puspa (Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan) hadir sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga miskin melalui pengembangan usaha produktif yang dikelola oleh perempuan, Suparno (2018).

Desa Karangharjo, Kabupaten Jember, merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui program pemberdayaan perempuan. Namun, tingkat kemiskinan di desa ini masih relatif tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain terbatasnya akses terhadap

sumber daya ekonomi, kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam berwirausaha, serta dominasi peran laki-laki dalam pengambilan keputusan ekonomi keluarga, Lestari, S. (2020).

Hasil ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan program pemberdayaan perempuan di masa mendatang, baik di tingkat lokal maupun nasional. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember (2021).

Pusat Statistik Kabupaten Jember yang menunjukkan bahwa tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember. Penduduk miskin Kabupaten Jember pada bulan Maret 2021 mencapai 166.820.00 jiwa. Pengentasan kemiskinan Pemprov Jatim membuat kebijakan tentang diterapkan Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur sebagaimana ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2021.

Selanjutnya menurut Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971) yang dikutip oleh Arikunto dan Jabar (2010), evaluasi program merupakan upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan.

Model evaluasi CIPP merupakan model evaluasi program yang dikembangkan oleh Daniel L. Stufflebeam. Konsep tersebut ditawarkan oleh Stufflebeam dengan pandangan bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan, tetapi untuk memperbaiki. Keempat kata yang disebutkan dalam singkatan CIPP tersebut merupakan sasaran evaluasi yang tidak lain adalah komponen dari proses sebuah program kegiatan. Langkah dan mengevaluasi suatu program dengan berdasarkan komponen-komponennya.

Empat komponen ini sebagai tipe atau fase dan sekaligus sasaran evaluasi, diantaranya:

a) *Context Evaluation*

Evaluasi konteks adalah evaluasi yang paling mendasar yang mempunyai misi untuk menyediakan suatu rasional atau landasan untuk penentuan tujuan. Evaluasi konteks sebagai fokus institusi adalah

mengidentifikasi target populasi dan menilai kebutuhan.

b) Input Evaluation

Evaluasi masukan adalah evaluasi yang mempertimbangkan kemampuan awal atau kondisi yang dimiliki oleh

instansi untuk melaksanakan sebuah program. Evaluasi masukan dilakukan untuk mengidentifikasi dan menilai kapabilitas sumber daya manusia, dana atau anggaran program yang telah dipilih.

c) Process Evaluation

Evaluasi proses merupakan evaluasi yang dirancang dan diaplikasikan dalam praktik (proses) atau membandingkan dalam implementasi kegiatan.

d) Product Evaluation

Evaluasi hasil merupakan tahap akhir evaluasi dan diketahui ketercapaian tujuan, kesesuaian dengan pencapaian tujuan, kesesuaian proses dengan pencapaian tujuan dan ketetapan tindakan yang diberikan.

Pemberdayaan perempuan adalah suatu upaya dalam peningkatan peran-peran perempuan itu sendiri. Pemberdayaan bagi kaum perempuan sangatlah penting karena perempuan itu tidak hanya bisa dipandang

untuk masalah urusan rumah tangga saja, akan tetapi perempuan juga bisa berpera aktif diluar rumah baik berorganisasi, berkarir atau bersosial diluar rumah sebagai upaya meningkatkan potensi dirinya (Zubaidi, 2013).

Azizah Al-Hibri dkk (2001), mengemukakan bahwa perempuan mampu bertanggungjawab atas pilihannya terhadap dirinya dan orang lain, serta dapat mengevaluasi pengembangan identitasnya. Selain itu, pemberdayaan perempuan juga bisa diartikan sebagai usaha perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri, meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan konsep dirinya.

Pemberdayaan perempuan merupakan isu krusial yang terus menjadi sorotan dalam berbagai konteks sosial, budaya, dan politik. Konsep ini mencakup upaya untuk meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan, mengakses sumber daya, dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan masyarakat (Kaelan, 2017).

Pemberdayaan perempuan tidak

hanya sebatas memberikan akses terhadap pendidikan atau pelatihan, tetapi juga melibatkan perubahan sikap dan nilai-nilai yang mendasari relasi gender. Secara sederhana, pemberdayaan perempuan adalah proses untuk memberdayakan perempuan agar memiliki kendali atas hidup mereka sendiri.

Pemberdayaan perempuan memiliki beberapa dimensi yang saling terkait, antara lain:

- Dimensi ekonomi: Meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi, seperti berusaha, bekerja, dan mengelola keuangan.
- Dimensi politik: Memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
- Dimensi sosial budaya: Mengubah norma dan praktik sosial yang diskriminatif terhadap perempuan, serta mendorong partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial dan budaya.

Meskipun upaya pemberdayaan perempuan telah banyak dilakukan, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi, seperti:

- Diskriminasi gender: Perempuan masih sering menghadapi diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan.
- Kesenjangan akses: Perempuan seringkali memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan sumber daya lainnya.
- Norma dan budaya patriarki: Nilai-nilai patriarki yang masih kuat di masyarakat menjadi penghalang bagi pemberdayaan perempuan (Fredian TN, 2015).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan berbagai strategi pemberdayaan perempuan, antara lain:

- Peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan: Memberikan kesempatan bagi perempuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- Penguatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan: Memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai forum pengambilan keputusan.
- Kampanye kesadaran: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender.
- Penguatan jaringan perempuan: Membangun jaringan perempuan untuk saling mendukung dan memperkuat posisi tawar.

Menurut Saragih (2007), *livelihood* dapat dimaknai sebagai strategi mencari nafkah, yaitu berbagai upaya yang dilakukan seseorang untuk memanfaatkan berbagai sumberdaya yang dimilikinya untuk mendapatkan penghasilan sehingga mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pendekatan *sustainable livelihood* berusaha mengidentifikasi hambatan-hambatan paling besar yang dihadapi oleh manusia, dan peluang-peluang yang paling menjanjikan dan terbuka bagi masyarakat, terlepas darimana aslinya (misalnya disektor mana, pada wilayah mana atau tingkat apa, dari lokal sampai internasional).

Sustainable livelihood menjelaskan faktor-faktor utama yang mempengaruhi penghidupan masyarakat serta hubungan khusus diantara faktor-faktor tersebut. Konsep ini bisa digunakan baik untuk merencanakan kegiatan-kegiatan baru maupun untuk melaluisumbangan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan bagi berkelanjutan penghidupan (Saragih, dkk, 2007).

Program Jatim Puspa ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penanganan dampak Covid-19 untuk meningkatkan pendapatan masyarakat terdampak sehingga dapat pulih

dan meningkatkan ketahanan sosial ekonominya. Program Jatim Puspa ini merupakan salah satu ikhtiar Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam penanganan dampak Covid-19 untuk meningkatkan pendapatan masyarakat terdampak sehingga dapat pulih dan meningkat ketahanan sosial dan ekonominya.

Program Jatim Puspa merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna meningkatkan pendapatan masyarakat yang terdampak sehingga perekonomian masyarakat dapat pulih kembali serta dapat meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosialnya (Aziz, 2021).

Terdapat beberapa bentuk bantuan yang diberikan, diantaranya barang penunjang usaha, pendamping desa, pelatihan peningkatan kapasitas usaha, fasilitas pemasaran produk, menciptakan jaringan usaha, melibatkan dunia usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR) untuk ikut serta memberdayakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan lain sebagainya (Maulana, 2021).

Dimensi kemiskinan dapat berupa keadaan melarat (*deprivation*) dan bila dimasukkan dalam konteks tertentu kemiskinan berkaitan dengan minimnya

pendapatan, harta, kekuatan fisik isolasi kerapuhan, dan ketidakberdayaan (Chambers, 1996). Kemiskinan serta penyebabnya berdampak terhadap ketidakberdayaan masyarakat yang bersumber dari ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial (Friedmann, 1992). Basis kekuasaan sosial tersebut seperti tingkat pendidikan, pendapatan, kesehatan, dan gizi.

Fenomena kemiskinan bukan hanya terbatas pada kurangnya keuangan, melainkan kurangnya kreativitas, kurangnya motivasi, kurangnya kesempatan untuk bersosialisasi dengan berbagai potensi, dan sumber daya yang ada diantaranya lemahnya mengembangkan potensi diri, serta tertutupnya potensi diri untuk berkembang di masyarakat (Agus Suryono, 2010).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini banyak menggunakan analisis, Ramdhan M. (2021). Menurut A. Muri Yusuf (2016) pendekatan kualitatif dapat digunakan apabila ingin melihat dan mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya, menemukan makna atau pemahaman yang mendalam tentang suatu

masalah yang dihadapi.

Fokus penelitian yang berjudul “Evaluasi Program Jatim Puspa (Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan) Dalam Menciptakan Mata Pencaharian Berkelanjutan Bagi Keluarga Miskin di Desa Karangharjo Kabupaten Jember”.

Menurut Meleong (2010) bahwa fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Fokus penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah dimana masalah penelitian dijadikan acuan dalam menentukan fokus penelitian dengan menggunakan indikator evaluasi Model evaluasi CIPP yang dikemukakan oleh Daniel L. Stufflebeam (2017) yang meliputi *context evaluation*, *input evaluation*, *proses evaluation*, dan *product evaluation*.

Lokasi penelitian ini berpusat di Desa Karangharjo Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini agar dapat menangkap fakta yang sebenarnya dari objek yang diteliti sesuai dengan judul penelitian yaitu “Evaluasi Program Jatim Puspa (Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan) Dalam Menciptakan Mata Pencaharian

Berkelanjutan Bagi Keluarga Miskin di Desa Karangharjo Kabupaten Jember?”. Data diperoleh melalui, dokumentasi, observasi dan wawancara.

Data analisis dengan menggunakan interaktif (Miles and Huberman 2004), mengemukakan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data yang diperoleh sudah jenuh. Aktivitas dan analisis data, yaitu dengan koleksi data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian mengandung beberapa pembagian diantaranya sebagai berikut.

- *Context Evaluation*

Berdasarkan hasil penelitian, sasaran bantuan Program Jatim Puspa terhadap KPM memenuhi kriteria dari berhasilnya Program Jatim Puspa yakni ibu rumah tangga sebagai pelaku usaha melalui graduasi serta pengganti KPM dari data DTKS yang sebelumnya. Tujuan program Jatim Puspa ini telah berjalan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua pelaksana Program Jatim Puspa. Dimana hasil wawancara menunjukkan

bahwa masyarakat sudah bisa mengembangkan usahanya khususnya KPM yang menerima bantuan Jatim Puspa walaupun berkembangnya dengan tahapan dan proses.

- *Input Evaluation*

Input evaluation terfokus pada aspek sumber daya manusia dan dana atau anggaran. Sumber daya manusia merupakan kelompok manusia yang terdiri dari manusia yang memiliki kemampuan untuk memberikan jasa dan manusia yang mempunyai kemampuan terpadu yang dicirikan dengan pola pikir dan daya fisik yang baik. Berdasarkan penelitian, sumber daya manusia dari Program Jatim Puspa di Desa Karangharjo merupakan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Ketua Pelaksana Program Jatim Puspa. Sejauh ini Kepala Desa yang mengikuti pernah mengikuti diklat. Anggaran berfungsi sebagai perencanaan dan pengendalian kegiatan. Pendanaan pada suatu organisasi atau program berfungsi sebagai sumber untuk membantu dalam pemenuhan kebutuhan program. Pendanaan atau anggaran dalam pelaksanaan Program Jatim Puspa di Desa Karangharjo berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur melalui BKK Desa. Hal ini dibenarkan dalam Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum

Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi.

- *Process Evaluation*

Evaluasi proses merupakan evaluasi yang dirancang dan diaplikasikan dalam praktik (proses) atau membandingkan dalam suatu kegiatan. Jadi pada dasarnya evaluasi proses digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana rencana telah diterapkan dan komponen apa yang perlu diperbaiki. Evaluasi proses berhubungan dengan kesesuaian prosedur, pemantauan, hingga hambatan dalam pelaksanaan program.

Prosedur, data hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Program Jatim Puspa di Desa Karangharjo memiliki prosedur yang sudah jelas sehingga kegiatan bantuan program Jatim Puspa bisa berjalan dengan baik.

Pemantauan program, ialah kepekaan mengenai pengetahuan yang dibutuhkan. Pemantauan dengan tingkat optimal dapat digunakan untuk melaksanakan perhitungan dengan memperlihatkan mobilitas mencapai tujuan. Tahap ini berpondasi pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan tujuan memastikan realisasi Program Jatim Puspa sesuai ketentuan yang ditetapkan. Dari hasil

penelitian menunjukkan bahwa ada pemantauan dari dinas PMD langsung ke desa. Pemantauan secara fungsional dengan pihak provinsi.

Kendala, merupakan kondisi yang memberikan penghalang, maupun pencegahan dalam meraih tujuan. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa kendala dari pihak desa yaitu kurang maksimalnya KPM dalam mengembangkan usahanya. Ada KPM yang kurang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.

- *Product Evaluation*

Program Jatim Puspa di Desa Karangharjo sudah memenuhi kebutuhan usaha Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sehingga perekonomian meningkat karena dampak Covid-19. Bantuan Jatim Puspa sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan sudah tepat guna barang yang diberikan sehingga hasil dari program Jatim Puspa sudah menciptakan mata pencaharian berkelanjutan.

Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di lapangan menunjukkan bahwa program Jatim Puspa di Desa Karangharjo sudah bisa meningkatkan ekonomi dan menciptakan mata pencaharian berkelanjutan. Program Jatim Puspa juga mengurangi beban Keluarga Penerima

Manfaat (KPM) terutama ibu rumah tangga. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu keluarga miskin agar mampu meningkatkan kualitas hidup serta mampu memutus rantai kemiskinan.

Pembahasan

Dampak terjadi sebagai akibat dari peristiwa dan perkembangan sosial dan memberikan hasil positif atau negatif. Dampak positif adalah bertransformasi menjadi lebih baik dan dampak negatif adalah penurunan terjadi ketika bantuan diberikan. Pemberian bantuan di Desa Karangharjo berdampak ekonomi pada masyarakat KPM yang telah dibantu.

Dampak ekonomi ialah transformasi yang terjadi dalam bidang ekonomi dari segi pendapatan KPM. Kebijakan yang memberikan manfaat pada banyak pihak lebih mudah diimplementasikan karena mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran atau masyarakat (Grindle dalam Anggara (2014)). Kemudahan implementasi Program Jatim Puspa berkaitan dengan adanya dampak yang positif berupa manfaat yang dirasakan bagi Kelompok Penerima Manfaat (KPM) khususnya Anggota Rumah Tangga (ART) perempuan penerima program di Desa Gunungsari.

Menurut Mustari (2015), program Pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang dibuat oleh pembuat program yang mencakup cara pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Adapun tujuan dari Program Jatim Puspa sendiri telah memberikan dampak positif kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Berdasarkan hasil penelitian, dampak ekonomi pada bantuan Program Jatim Puspa ini telah dilakukan oleh perangkat desa. Dimana hasil wawancara menunjukkan bahwa dampak ekonomi terhadap masyarakat diantaranya sebagai berikut.

Pendapatan KPM meningkat, pendapatan merupakan upaya melalui pencurahan modal dan tenaga guna memaksimalkan laba dalam waktu tertentu. Dengan bertambahnya modal usaha serta barang yang diminta dapat memenuhi kebutuhan KPM sehingga pendapatan semakin meningkat walaupun peningkatannya tidak banyak tetapi ada perubahan secara meningkat sehingga perekonomian KPM bisa terpenuhi.

Kebutuhan Ekonomi Tercukupi dan tercukupi dengan adanya program Jatim Puspa ini, karena bantuan yang diberikan bersifat *continue* sehingga KPM bisa meneruskan usahanya dan ada pemasukan

setiap hari untuk memenuhi kebutuhannya.

Bertambahkan produk yang diperjualkan belikan oleh KPM Dagangan KPM semakin bertambah dan tidak hanya menjual sesuai dengan usahanya, namun barang serta produknya juga bertambah.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan analisis penelitian terkait evaluasi program Jatim Puspa (Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan) dalam menciptakan mata pencaharian berkelanjutan bagi keluarga miskin di Desa Karangharjo Kabupaten Jember, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Evaluasi konteks sudah baik, karena sasaran sudah tepat terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan data dan tujuan dari program Jatim Puspa sudah ada yang tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

Evaluasi masukan cukup baik, pendamping program Jatim Puspa menjalankan tugasnya sesuai dengan amanah dan pengelolaan dana atau anggaran sudah baik dan tepat.

Evaluasi proses sudah baik, meskipun ada beberapa kendala tetapi prosedur pelaksanaan sudah jelas dan pemantauan juga terlaksana sehingga mengetahui proses berkembangnya para

Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Product Evaluation (Evaluasi Hasil)

Evaluasi hasil cukup baik, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menerima bantuan dengan baik dan memanfaatkannya sebaik mungkin sehingga kebutuhan untuk usahanya dapat meningkatkan perekonomian. Indikator keberhasilan dari Program Jatim Puspa terpenuhi.

Dampak ekonomi dalam menciptakan mata pencaharian berkelanjutan bagi keluarga miskin di Desa Karangharjo meliputi pendapatan dari KPM semakin meningkat dengan adanya Program Jatim Puspa, kebutuhan ekonomi semakin tercukupi, dan bertambahnya barang dagangan yang diperjual belikan oleh KPM. Hasil evaluasi program Jatim Puspa (Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan) dalam menciptakan mata pencaharian berkelanjutan bagi keluarga miskin di Desa Karangharjo Kabupaten Jember keseluruhan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan kembali. Pelaksanaan bantuan program Jatim Puspa dapat dilanjutkan dengan catatan guna untuk terpenuhinya kebutuhan usaha Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Saran dalam penelitian ini ialah Untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lebih di maksimalkan atau diperbanyak lagi

untuk tahun selanjutnya dan KPM juga meminta ke desa laporan untuk keberlanjutan Program Jatim Puspa tersebut.

Peneliti memberikan saran untuk pihak-pihak terkait, diantaranya pertama, Pendamping diharapkan perangkat desa serta panitia lebih dipantau lagi program yang telah diberikan kepada KPM supayanantinya usaha yang dijalankan bisamembawa KPM untuk memenuhi kebutuhannya. Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Diharapkan kepada KPM penerima bantuan program Jatim Puspa lebih dikembangkan lagi usaha yang sedang dijalankan saat ini, lebih banyak menggali informasi tentang berbagai macam sumber supaya usaha yang dijalankan lebih berkembang lagi.

Kedua, Peneliti selanjutnya diharapkan kepada penelitiselanjutnya agar dapat meneliti lebih dalam lagi mengenai evaluasi program Jatim Puspa dan dapat mewawancarai informan lebih banyak lagi agar dapat mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

Daftar Pustaka

1. Anggara, S. (2014). *Pengantar Kebijakan Publik*.
2. Arikunto, S., & Jabar S. C. (2010). *Evaluasi Program Pendidikan*.

Jakarta: Bumi Akasara.

3. Aziz, A. (2021, September 6). Pemprov Manfaatkan Program "Jatim Puspa" Untuk Pulihkan Ekonomi. Retrieved from Antara News: <https://www.antaraneews.com/berita/2375742/pemprov-manfaatkan-program-jatim-puspa-untuk-pulihkan-ekonomi>.
4. Azizah Al-Hibri dkk (2001), *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026*. Jember: Bappeda Kabupaten Jember.
6. Badan Pusat Statistik. (2023). *Laporan Hasil Survei Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga*. Jakarta: BPS.
7. Chambers, R. (1996). *PRA Memahami Desa Secara Partisipasif*. Yogyakarta: Kanisus.
8. Chasanah, U., Novitasari, T., Nabila, A. S., & Wahyudi, K. E. (2021). *Implementasi Program Keluarga Miskin Di Kecamatan Gayungan Surabaya Pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru*. 2(5).
9. Daniel L. Stufflebeam (2017), *The CIPP Evaluation Model*, New York: Guilford publications.
10. Fredian, TN. (2015), *Sosiologi Umum, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia*.

11. Friedman, John, (1992). *Empowerment The Politics of Alternative Development*. Cambridge, USA.
12. Kaelan, S. (2017). *Pemberdayaan Perempuan: Perspektif Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
13. Lestari, S. (2020). *Analisis Pengaruh Program Pemberdayaan Perempuan terhadap Pendapatan Keluarga*. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
14. Meleong, & Lexy, J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
15. Miles, B. M., & Michael, H. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
16. Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi & Evaluasi Kebijakan Publik nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan* Ismawan, Indra (2001), *Memahami Reformasi Perpajakan*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
17. Nuryana, W. (2022). *Efektivitas Pemberian Bantuan Program Jatim Puspa (Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan) Untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Di Desa Sawoo Kabupaten Ponorogo*.
18. Ramdhan, M. (2021), *Metodologi penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara.
19. Saragih, dkk (2007), *Kerangka Penghidupan Berkelanjutan*, Bandung: Alfabeta.
20. Sasmito, C., & Nawangsari, E. R. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 3(2), 68. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p68-74>.
21. Sastra, Eka (2017), *Kesenjangan ekonomi mewujudkan keadilan sosial di Indonesia*, Expose.
22. Satria, A. (2022, Januari 14). 50 Ribu Pekerja di Jatim Terdampak Pandemi Covid-19. (Radar Surabaya) Retrieved Agustus 12, 2022, from [radarsurabaya.id: https://radarsurabaya.jawapos.com/surabaya/14/01/2022/50-ribu-pekerja-di-jatim-terdampak-pandemi-covid-19/](https://radarsurabaya.id/surabaya/14/01/2022/50-ribu-pekerja-di-jatim-terdampak-pandemi-covid-19/).
23. Soetrisno, Loekman. (1997). *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
24. Suparno. (2018). *Pemberdayaan Perempuan dalam Mengurangi Kemiskinan*. *Jurnal Ilmu Sosial*, 12(2), 115-128.
25. Suryono, Agus. (2010), *Dimensi-dimensi prima teori pembangunan*, Malang: UB Press.
26. Wardhani, R. A. (2019). *Peran Perempuan dalam Pembangunan Ekonomi Keluarga*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(1), 45-58.
27. Yusuf, A. Muri, (2016), *Metode*

Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, Jakarta: Prenada Media.

28. Zubaedi, (2013), *Pengembangan masyarakat wacana dan praktik*, Jakarta: Kencana.